DEMOKRASI DAN POLITIK BIAYA TINGGI (*HIGH COST POLITICS*)**Ahmad Burhan Hakim¹⁾, Muhyidin Muhyidin²⁾**¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, IndonesiaEmail : burhanhernandez@gmail.com¹ , muhyidin059@gmail.com²

Abstrak : Demokrasi merupakan suatu konsep bernegara dan berpolitik yang di anggap paling ideal saat ini. Demokrasi juga punya peran penting dalam menata aturan main politik dan bernegara di Indonesia. Sehingga setelah reformasi tahun 1998 demokrasi menjadi salah satu ideologi penting dalam berpolitik di Indonesia. Konsep keadilan, keterbukaan, perwakilan, transparansi dan akuntabilitas menjadi rangkaian konsep yang epik dalam demokrasi. Konsep dasar tersebut sesungguhnya sangat mulia. Hanya saja dalam pelaksanaannya demokrasi tidak hanya sebuah konsep mentah semata. Perhelatan politik elektoral ternyata membuahkan konsekuensi logis yakni politik berbiaya tinggi yang tidak bisa lepas dari tiap-tiap moment demokrasi. Maka tidak heran apabila dalam moment politik misalkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dari Provinsi sampai Kabupaten dan Kota bahkan sampai Pemilihan Kepala Desa membutuhkan dana yang besar. Baik dari segi pelaksanaan sampai suksesi calon. Akibatnya adalah maraknya budaya korupsi yang terjadi di negeri kita. Sehingga hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap politik bernegara yang ada di Indonesia. demokrasi memang punya konsep ideal yang luar biasa hanya saja dalam pelaksanaan demokrasi tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kata Kunci : *Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas,*

Abstract : Democracy is a concept of state and politics which is considered the most ideal today. Democracy also has an important role in arranging the rules of the political and state game in Indonesia. So that after the 1998 reformation democracy became one of the important ideologies in Indonesian politics. The concepts of justice, openness, representation, transparency and accountability are a series of epic concepts in democracy. The basic concept is actually very noble. However, in practice, democracy is not just a raw concept. Electoral political events have resulted in a logical consequence, namely high-cost politics that cannot be separated from every moment of democracy. So do not be surprised if in political moments such as the Presidential Election, Legislative Member Election, Regional Head Election from Province to Regency and City and even Village Head Election requires large funds. Both in terms of implementation to the succession of candidates. The result is a widespread culture of corruption that occurs in our country. So this will certainly affect state politics in Indonesia. Democracy does have an extraordinary ideal concept, but the implementation of democracy requires a lot of funds..

Keywords : *Democracy, Transparency, Accountability,*

A. Pendahuluan

Demokrasi adalah salah satu ideologi atau bahkan suatu sistem politik yang banyak dianut dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* bermakna pemerintahan. Sehingga mempunyai arti pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi rakyat adalah subjek dan objek dalam demokrasi sehingga agent utama dalam demokrasi adalah rakyat. Secara konseptual berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.¹ Demokrasi juga bertujuan untuk membentuk sebuah konsep negara yakni *welfare state* atau negara kemakmuran.

Dengan konsep semacam itu maka demokrasi adalah suatu tatanan, sistem, konsep dan ilmu bernegara yang sangat ideal apabila diterapkan secara baik pada sebuah negara. Demokrasi juga berarti sebuah keterbukaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, keadilan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Maka sungguh mulia konsep demokrasi tersebut apabila diterapkan secara benar adanya. Namun penjelasan diatas lebih pada demokrasi dalam ranah substantif. Artinya bahwa konsep awal demokrasi tentu adalah sebuah pemerintahan rakyat, kebebasan, keadilan dan lain-lain seperti yang disebutkan diatas.

Kemudian dalam demokrasi dikenal juga sebuah prosedur. Yakni adanya suatu prosedur pemilihan politik yang kemudian menjadi alat atau cara dalam merebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Bagaimana prosedur politik dalam demokrasi. Tentu kita secara harfiah bisa menemukannya. Semisal pemilihan presiden (PILPRES) dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung. Pemilihan legislatif (PILEG) secara langsung baik tingkat pusat sampe ke daerah. Begitu juga pemilihan kepala daerah secara langsung yang kita kenal dalam bentuk PILKADA, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Sampai pada pemilihan kepala desa atau PILKADES.

Semua moment atau event politik dalam demokrasi tadi bisa disebut dengan prosedur. Atau dalam bahasa konseptualnya yakni demokrasi prosedural. Dimana dalam melaksanakan proses tersebut banyak pundi-pundi uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan partai politik yang ikut dalam kontestasi tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara tentunya sudah barang tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan proses pemilihan terssbut. Partai politik, calon presiden beserta waknya, calon anggota legislatif, calon gubernur beserta wakilnya, calon bupati/wakil kota beserta wakilnya tentu juga akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenangkan proses pemilihan tersebut.

Maka dalam demokrasi tadi akan menciptakan sautu politik yang berbiaya tinggi atau dalam bahasa lain disebut *high cost politics*. sehingga tidak jarang kita temui bahwa peserta dalam pemilihan baik PILPRES, PILEG atau PILKADA adalah mereka yang memang secara ekonomi sudah mapan atau diatas rata-rata. Sehingga ketika kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa demokrasi memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi mereka yang mempunyai uang lebih untuk bermain dalam event-event demokrasi yang ada seperti disebutkan diawal.

Maka akan jarang sekali orang atau calon dengan kondisi ekonomi biasa maju sebagai calon dalam sebuah PILKADA, PILEG dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang

¹ Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020) 45-46

muncul kenapa demokrasi memunculkan iklim politik biaya tinggi?, hal ini menjadi wajar adanya apabila politik dalam demokrasi kita menghabiskan dana yang cukup besar atau berbiaya tinggi. Mulai dari pembentukan Tim Sukses, alat peraga kampanye, rekom partai dan yang paling besar yakni ada pada soal *Money Politics* yang masih ada dalam perhelatan demokrasi di Indonesia.

Maka dalam tulisan sederhana ini penulis ingin menganalisis sebab dan dampak dari politik biaya tinggi yang timbul dari parade demokrasi yang ada di negara kita. Ini perlu dikaji karena demokrasi adalah suatu sistem yang dekat dengan kita. Demokrasi adalah suatu nyawa politik yang hari ini berhembus kencang hampir di banyak negara didunia. Maksudnya adalah apabila pragmatisme ini dibiarkan berlarut maka korban yang sesungguhnya adalah rakyat kita sendiri. Sehingga demokrasi juga bisa memajukan rakyat dan juga bisa menjadi penyebab kemunduran rakyat.

Kemunduran tersebut lantaran terjadinya banyak korupsi di berbagai daerah. Baik yang dilakukan oleh Kepala Daerah ditingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten atau Kota. Belum lagi korupsi yang terjadi pada tataran lembaga legislatif yang dilakukan anggotanya pada tingkat yang sama. Kemunculan banyak kasus korupsi ini ditenggarai karena biaya politik yang cukup mahal yang terjadi di Indonesia. sebagai contoh misalkan, sudah menjadi rahasia umum apabila seorang akan mencalonkan sebagai Bupati atau Walikota yang bisa menghabiskan dana sekitar 50 milyar lebih dalam setiap pencalonan. Biaya ini bisa meningkat di level yang lebih tinggi.

Pencalonan pada tingkat anggota legislatif daerah pun demikian. Pada level anggota Dewan tingkat daerah misalkan. Calon anggota legislatif paling tidak minimal bisa menghabiskan biaya kurang lebih 1,5 milyar. Sehingga biaya yang besar tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya korupsi. Walaupun tidak semua anggota dewan atau kepala daerah melakukan korupsi walaupun dengan biaya pencalonan yang besar.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

C. Temuan Data dan Diskusi

C.1 Makna dan Konsep Ideal Demokrasi

Reformasi politik menghendaki revitalisasi institusi-institusi demokrasi supaya dapat mendo-rong tumbuhnya sistem politik yang demokratis. Pasca-amendemen UUD 1945, DPR RI adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi (mengusulkan, membahas, dan mengesahkan ber-sama Presiden) yang sesuai dengan konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Revitalisasi institusi politik dapat dimulai dengan menciptakan konstitusi yang demokratis dan membagi cabang-cabang kekuasaan negara dalam kerangka checks and balances, akuntabilitas serta jaminan atas pengakuan hak-hak asasi manusia. Cabang-cabang

kekuasaan negara dibagi dengan menggunakan konsep *distribution of powers* agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dilakukan secara mutlak.

Rousseau² menegaskan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengaruh kepentingan pribadi kepada urusan publik. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of powers*), perlu adanya pembatasan kekuasaan ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang disebut dengan *distribution of powers*. *Distribution of powers* dikenal dengan dua bentuk, yaitu *separation of powers* dan *division of powers*. Konsep *separation of powers* pertama kali dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke dalam Subekti,³ kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain.

Ajaran *trias politica* kemudian muncul dalam buku *The Spirit of Laws* karangan Montesquieu. Kekuasaan harus dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut mesti terpisah satu sama lain, baik fungsi maupun organnya. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan negara berada di satu lembaga saja sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, melainkan menurut anggota-anggota sebagai suatu komunitas secara keseluruhan.⁴ Sebenarnya, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos*. *Demos* dalam bahasa Yunani menggambarkan jumlah yang banyak dan cenderung menunjukkan rakyat secara keseluruhan. Secara sederhana, hal itu menjelaskan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan untuk kaum miskin karena kaum miskin pada zamannya merupakan jumlah terbanyak yang terwakili oleh kata *demos*.⁵ Secara umum terdapat dua model demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kelsen⁶ menjelaskan, demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relatif paling tinggi, ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh rakyat dalam rapat umum atau pertemuan akbar. Namun, prinsip ini hanya dapat dijalankan oleh masyarakat yang berada dalam kondisi sosial yang sederhana.

Dalam demokrasi langsung yang kita jumpai di suku-suku barbar di Jerman kuno, masyarakat polis di Yunani, sampai senat di zaman Romawi kuno, prinsip ini awalnya dijalankan secara luas dan murni merupakan konsensus. Namun, seiring berkembangnya peradaban manusia dan bertambahnya jumlah populasi manusia, prinsip ini mulai dikesampingkan. Hari ini hanya beberapa daerah yang menggunakan prinsip demokrasi langsung ini. Salah satunya adalah Swiss, yang di beberapa daerah bagiannya masih menggunakan prinsip demokrasi langsung. Majelis rakyatnya disebut sebagai *Lands-gemeinde*, yakni masyarakat secara langsung memilih dan mengawasi para majelis yang nantinya membuat sebuah kebijakan di daerah tersebut.

Model demokrasi yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Perbedaan kondisi-kondisi serta perkembangan peradaban manusia menciptakan kondisi ketika konsensus bersama tidak mungkin lagi dilakukan dalam kehidupan bernegara.

² Rousseau, J. J. *Du contract social* (Edisi Terjemahan). (Jakarta: Visimedia. 2007) 67-68

³ Subekti, V. S. . *Menyusun konstitusi transisi*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008) 77-78

⁴ Strong, C. F. (*The modern political constitutions*. (London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limite. 1966). 23-25

⁵ Unger, R. M. *Teori hukum kritis*. (Bandung: Nusamedia. 2008) 85-87

⁶ Kelsen, H. *Teori umum tentang hukum dan negara*. (Bandung: Nusamedia.2008) 30-35

Fungsi pembentukan undang-undang dipindahkan dari warga negara melalui majelis rakyat menuju organ-organ khusus yang dibentuk. Organ-organ ini dibentuk melalui pemilihan umum, dan warga negara bisa me-mercayakan aspirasinya dengan mendelegasikan calon ke dalam organ khusus ini. Organ khusus ini umumnya disebut parlemen. Kelsen⁷ menjelaskan bahwa organ ini diberi wewenang untuk membuat atau melaksanakan norma-norma hukum, dipilih oleh subjeknya dan melaksanakan norma-norma hukum tersebut. Prinsip ini merupakan pengurangan dari prinsip penentuan diri sendiri (*self-determined principal*).

Dari penjelasan demokrasi di atas, kesimpulan yang sangat penting sekaligus menjadi akar dari negara berkonstitusi adalah, pertama, negara berkonstitusi harus menerapkan sistem demokrasi karena, dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan negara. Kedua, negara demokrasi merupakan negara yang menempatkan masyarakat sebagai instrumen dasar dari segala tindakan pemerintah. Hal ini terjadi karena, dalam sistem demokrasi, jabatan-jabatan publik dapat dipilih dan diawasi langsung oleh masyarakat.

Dari kedua kesimpulan di atas, hal penting bagi negara yang menerapkan asas kedaulatan rakyat adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Negara demokrasi ialah kekuasaan sipil yang berasal dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, dan masyarakat (konstituen) mendelegasikan calon-calon anggota majelis perwakilan untuk menciptakan hukum. Salah satu ide mengenai keterlibatan masyarakat luas dalam menjalankan pemerintahan adalah demokrasi deliberatif seperti yang dikemukakan Jürgen Habermas.

Menurut Habermas, ruang publik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politis. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Hal ini sejalan dengan hakikat demokrasi yang disampaikan oleh James S. Fishkin. Fishkin (2009, 1–9) menjelaskan bahwa demokrasi memberikan “suara” kepada masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menemukan penyelesaian masalahnya.⁸ Ini adalah hal esensial dalam demokrasi, tetapi terkadang dimaknai secara berbeda dalam penerapannya. “Suara” dalam demokrasi diartikan sebagai kesempatan bagi setiap warga negara sebagai individu untuk mengarahkan kebijakan negaranya sesuai dengan yang diinginkan.

Demokrasi, menurut Habermas, harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu posisi ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif ingin membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga negara. Partisipasi yang luas ini bertujuan menciptakan hukum yang sah. Pandangan ini merupakan kritik atas pendapat Rousseau (2007),⁹ bahwa sumber legitimasi adalah kehendak umum sehingga, bagaimanapun prosesnya, jika sebuah produk hukum dinyatakan sebagai kehendak umum, berarti produk tersebut sudah terlegitimasi. Hal ini ditentang oleh Habermas (1982),¹⁰ yang mencontohkan bahwa dalam suatu negara, jika undang-undang dianggap sebagai sebuah kehendak umum, tidak peduli apakah dalam pembuatannya melalui cara yang partisipatif atau tidak, dan emansipatoris atau tidak, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan terlegitimasi.

⁷ Ibid hal 408, 2008).43-44

⁸ Fishkin, J. S. . When the people speak. (London: Oxford University Press. 2009) 65-67

⁹ Rousseau, J. J. Du contract social (Edisi Terjemahan). (Jakarta: Visimedia. 2007) 123-124

¹⁰ Habermas, J.. The theory of communicative action: Reason and rationalization of society. (Boston: Beacon Press. 1982) 89-90

C.2 Pragmatisme Politik dalam Demokrasi

“*The end of ideology*”, demikianlah simpulan Fukuyama (1992) lebih dari dua dekade lalu atas perkembangan masyarakat dunia dewasa ini. Apa yang dimaksud oleh Fukuyama jelas bukan lah eksistensi ideologi telah berakhir, melainkan berakhirnya tantangan ideologis bagi demokrasi liberal dan kapitalisme pascaruntuhnya benteng diktatorial dan komunisme di Uni Soviet.¹¹ Bagi Fukuyama, kejatuhan komunisme telah meman-tapkan posisi demokrasi liberal sebagai ideologi dominan yang menjadi semacam episentrum ideologi tanpa lawan yang berarti, sebagai ujung dari perjalanan sejarah manusia (*the end of history*).

Konsep “telah berakhirnya ideologi” di Indonesia dapat diterapkan dalam konteks terbatas. Masyarakat tidak lagi menempatkan ideologi sebagai acuan manakala melakukan ritual politik saat masuk dalam bilik-bilik suara, juga saat melakukan kampanye untuk mendapatkan suara. Mereka cenderung terlihat menjadi lebih pragmatis dalam berpolitik. Kehadiran sikap pragmatis tersebut pada akhirnya cukup mengesampingkan perhitungan-perhitungan yang lebih normatif, termasuk di dalamnya perhitungan atas dasar norma kebudayaan, kepercayaan atau aliran politik yang kemudian kerap juga disebut sebagai ideologi politik. Dengan demikian, ideologi politik tampak tidak lagi menjadi elemen yang cukup kuat untuk menjadi rujukan perilaku politik baik partai politik maupun masyarakat kebanyakan.

Studi yang dilakukan oleh Mujani dan Liddle (2010),¹² misalnya, mengindikasikan beberapa faktor yang menentukan perilaku pemilih yang terjadi dalam tiga kali pemilu terakhir. Menurut mereka figuritas dan rasa kedekatan dengan partai tertentu merupakan faktor-faktor yang

menentukan perilaku memilih pada Pemilu 1999 dan 2004. Studi mereka menyimpulkan bahwa pada Pemilu 2009 pemilih lebih dipengaruhi oleh media dan kapabilitas kandidat. Mereka mengatakan: “*voters were influenced in addition by the media campaigns of parties and presidential candidates, by their perceptions of the state of the national economy and by their evaluations of governmental performance*” (Mujani dan Liddle 2010: 97).¹³

Studi dari dua orang ahli politik Indonesia tersebut—yang secara kontinum sejak awal reformasi memotret perilaku politik masyarakat dalam pemilu—mengukuhkan pandangan yang melihat bahwa politik aliran atau ideologi politik memainkan peran terbatas dalam menentukan perilaku politik. Masyarakat saat ini semakin melihat hal-hal di luar itu, termasuk lebih melihat pilihan-pilihan kebijakan dan performa pemerintah dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini berupaya menganalisis penurunan peran ideologi politik dalam kehidupan politik saat ini. Penulis tidak bermaksud menyatakan bahwa peran ideologi politik itu sudah tidak ada sama sekali, namun secara umum perannya sudah semakin rendah dan digantikan oleh hal lain yang bersifat pragmatis.

Dalam konteks pemilu legislatif, masyarakat didekati oleh partai-partai yang ada saat ini yang lazim menggunakan pendekatan yang bersifat pragmatis. Simbol-simbol ideologis tetap ada, namun sudah semakin minim. Sistem proporsional terbuka yang mengharuskan kandidat untuk mendekati masyarakat secara langsung, makin menguatkan kenyataan ini. Banyak calon legislatif (*caleg*) yang menyadari bahwa mereka kurang dikenal kemudian menggunakan cara

¹¹ Fukuyama, Francis. *The End of History and The Last Man*. (New York: Free Press. 1992) 46-47

¹² Mujani, Saiful dan Liddle, William. “Voters and the New Indonesian Democracy”. Dalam Aspi-nall, Edward dan Mietzner, Marcus. *Problems of Democratisation in Indonesia*. (Singapore: ISEAS: 2010.) 75-99.

¹³ *Ibid*

cepat untuk dapat terkenal dan menarik perhatian masyarakat. Misalnya, memberikan sesuatu yang konkret kepada masyarakat, seperti pemberian kebutuhan bahan pokok, melakukan kegiatan sosial yang sifatnya gratis, pembagian hadiah melalui kegiatan amal atau kompetisi olah raga, mengadakan pertunjukan hiburan rakyat, bahkan ada pula yang langsung memberikan uang kepada masyarakat.

Dalam beberapa kasus pertunjukan hiburan rakyat, yang biasanya menghadirkan penyanyi dangdut dan pelawak, menjadi ajang “bagi-bagi” uang. Pola pendekatan seperti itu, dapat menyebabkan nuansa politik uang demikian menggejala. Beberapa lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), misalnya, mencatat bahwa pada Pemilu 2009, caleg merupakan aktor utama (82%) dari pelaku politik uang dalam pengertian membeli suara (vote buying) (Husein 2012).¹⁴

Di sisi lain, pengedepanan ideologi menjadi semakin jarang terjadi, mengingat masyarakat memang juga semakin pragmatis atau tidak mepedulikan hal itu. Hasil kajian Mujani dan Liddle (2010) sekali lagi dapat dilihat sebagai pembuktian dari tren perilaku politik yang digerakkan oleh hal-hal di luar ideologi.¹⁵ Saat ini masyarakat cenderung tidak tabu lagi untuk mengaitkan kemampuan seorang politisi yang memberikan hasil konkret terutama berupa pembangunan fisik di suatu wilayah, pada saat menjelang pemilu dengan kelayakan untuk dipilih. Menurut salah seorang responden, bagi masyarakat di tingkat bawah, saat ini yang terpenting adalah para politisi itu dapat memberikan sesuatu kepada rakyat terlepas apapun benderanya

C.3 Politik Biaya Tinggi dalam Demokrasi

Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesempatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Di Indonesia Politik transaksional lebih dikenal sebagai istilah yang lebih diidentikan dengan pemilu. Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (vote buying) hingga kegiatan haram (racketeering).

Menurut Jeremy Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.¹⁶ Menurut Jeremy Boissevain dalam Nizam Sulaiman pendekatan transaksional terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif adalah menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk peraturan umum yang

¹⁴ Husein, Harun. 2012. “Proporsional Terbuka: Yang Alpa pada Pengalamannya”. Dalam “Teraju-Republika, 15 Mei 2012”, dalam <http://bheleque.wordpress.com/2012/05/15/teraju-republika-15-05-12/>

¹⁵ Op.cit Mujani, Saiful dan Liddle, William. 2010. “Voters and the New Indonesian Democracy”. Dalam Aspi-nall, Edward dan Mietzner, Marcus. *Problems of Democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS: 75–99.

¹⁶ Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar. *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*. (Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2015) 90-91

formal dan unggul dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah peraturan permainan atau tidak melanggar norma.¹⁷

Menurut Johny Lomulus, Politik uang merupakan kebijaksanaan dan/atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut, yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.¹⁸ Istilah “money politic” merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang, karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Strategi semacam ini mulai berkembang pada Pemilu 2004. Adapun bentuk dari politik transaksional (money politic) antara lain dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako (beras, minyak dan gula) dan barang-barang lainnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Di antara pemilih, para pemilih tidak lagi secara suka mendukung partai. Mereka ikut mendukung, asalkan terdapat imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu. Misalnya, mereka mau berkampanye asalkan mendapatkan uang transpor, memperoleh pakaian dan imbalan-imbalan material lainnya dan terkadang mereka ada juga yang menerima imbalannya tetapi pada saat pemilihan berlangsung pemilih tidak memilih calon yang memberikan imbalan tersebut, hal ini dikarenakan mereka hanya menginginkan materialnya saja.

Selama rentang waktu tahun 2005 sampai sekarang demokrasi Indonesia di tingkat lokal mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sepanjang periode tersebut masyarakat di tingkat lokal, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan di tingkat desa, memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung telah menyita perhatian publik, partai politik, dan para kontestan dengan menyedot triliunan rupiah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Diperkirakan lebih dari ratusan triliun rupiah uang dari APBD tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah dikeluarkan untuk pilkada hingga tahun 2014.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tidak sedikit teoretisi demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif.

Namun dalam perjalanannya hingga tahun 2015 yang akan menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak, pelaksanaan pilkada tersebut menuai pro dan kontra di beberapa kalangan, baik politisi, praktisi pemerintahan, akademisi politik dan pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung tersebut, seperti terjadinya pemborosan anggaran (tidak efisien), Kepala Daerah hasil pilihan rakyat sering tidak menampakkan ketidaksesuaian janji yang disampaikan

¹⁷ Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar.. Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak. (Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2015) 67-68

¹⁸ Lomulus, Johny. "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung", dalam Demokrasi Mati Suri, (Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1 Tahun 2007.) 55-56

saat kampanye, bahkan banyak kepala daerah yang tersandung kasus hukum karena tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan.

Selain itu, dalam pesta demokrasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut sering terjadi kasus sengketa mengenai perolehan hasil suara yang melibatkan para pendukung masing-masing calon, yang berujung pada konflik horizontal di banyak daerah, munculnya money politic di beberapa lapisan masyarakat maupun lembaga politik dan pemerintahan, serta munculnya beberapa kasus korupsi yang menyeret atau melibatkan banyak kepala daerah di Indonesia yang lahir dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut¹⁹. Terkait masalah korupsi tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa saat ini semakin banyak kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Sedikitnya terdapat 158 kepala daerah di tanah air yang menjadi tersangka korupsi.²⁰

Berbagai permasalahan yang muncul tersebut secara komprehensif dapat dilihat melalui perspektif politik transaksional, yang sudah menampakkan gejalanya menjelang pilkada serentak tahun 2015 ini. Hal tersebut dapat ditelusuri dari mulai proses pengajuan usulan calon di internal partai politik hingga tahapan-tahapan pilkada yang telah berjalan sampai saat ini. Adanya politik transaksional dalam pilkada ini, dampaknya tidak hanya sampai proses pilkada selesai atau pada hasil kemenangan pilkada, namun akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan hasil pilkada tersebut yang juga ditengarai tidak akan berjalan secara efektif.

D. Kesimpulan

Demokrasi sesungguhnya adalah suatu jalan ideologis untuk mencari pemimpin yang berkualitas, rakyat sebagai pemilih yang berkuasa atas demokrasi. Demokrasi sejatinya memberikan peluang bagi siapa saja untuk bisa menjadi pemimpin. Demokrasi juga erat hubungannya dengan keterbukaan, keadilan, egaliter, transparansi dan lain sebagainya. Demokrasi tidak hanya menyajikan konsep-konsep ideal tentang bernegara, namun juga memberikan dampak luar biasa terhadap konsep bernegara itu sendiri. Politik biaya tinggi yang muncul akibat proses elektoral (prosedur) dalam demokrasi memberikan ruang dan jalan pragmatisme yang tidak bisa dihindari.

Politik pragmatis dan transaksional lebih dominan daripada adu tentang ide gagasan dalam bernegara. Sungguh suatu hal yang sulit untuk dihindari, alih-alih menciptakan pemimpin yang kapabel, senyatanya demokrasi yang berbiaya tinggi tinggi menyebabkan terjadinya banyak korupsi baik di tingkat pusat sampai daerah. Kondisi pragmatis ini tidak hanya disebabkan oleh mentalitas politikus di negeri kita tapi ada kecenderungan bahwa masyarakat kita juga semakin berfikir pragmatis dalam politik hari ini. Ada muncul kemudian istilah *vote buying*, money politics dan lainnya. Yang mana hal tersebut makin memperparah kondisi politik kita hari ini.

Harusnya memang tidak tepat kalau demokrasi yang ideal tersebut dikaitkan dengan korupsi. Karena korupsi bisa jadi persoalan individu. Namun bagaimana kalau ternyata model atau sistem demokrasi kita sudah koruptif, tentu ini menjadi persoalan lain. Sehingga baik secara individu maupun sistem harusnya ada bangunan nilai kokoh yang termuat dalam konsep atau pelaksanaan demokrasi di negeri kita ini. Hanya praktek-praktek transaksional dan pragmatis dalam momentum demokrasi tidak dapat di hindari. Politik biaya tinggi sudah menjadi

¹⁹ Soleh, A. Khudori, "Islam tidak Sama dengan Demokrasi?", dalam (Jurnal El -Jadid, Pascasarjana UIN Malang, Vol. 3, No. 1, 2005)

²⁰ Subekti, V. S. Menyusun konstitusi transisi. (Jakarta: Rajawali Pers.2008)

konsekuensi logis atas pelaksanaan platform demokrasi yang sampai saat ini masih di anggap ideal.

Tentu apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja maka negara dan nasib rakyat Indonesia kedepannya akan dipertaruhkan. Korupsi menurut hukum adalah suatu kejahatan yang luar biasa atau dalam bahasa lain termasuk *extraordinary crime* . dimana ada dampak yang luar biasa muncul akibat dari korupsi tersebut. Dampak sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan hukum tidak lepas menjadi objek akibat korupsi tersebut. Sehingga kita layaknya sudah harus mampu melakukan evaluasi terhadap demokrasi yang anut sampai saat ini. Bukan berarti demokrasi itu tidak baik, namun pelaksanaan dalam berdemokrasi itulah yang semestinya kita evaluasi.

E. Daftar Kepustakaan

- Adinugroho, B., Prianto, G. F., Irwansyah, I., & Ernungtyas, N. F. Media Sosial Dan Internet Dalam Ketelibatan Informasi Politik Dan Pemilihan Umum. (*Jurnal Representamen Vol, 5(02)*. 2019).
- Anastokeskus TSK. Sosiaalisen median sanasto. (Helsinki : politica, 2010)
- Alfiyani, N.. Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik. (*Potret Pemikiran, 22(1)*,2018)
- Aminullah, Akhirul. Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2009. (*Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2010*),
- Ardha, B. , Social Media sebagai media kampanye partai politik 2014 di Indonesia. (*Jurnal Visi Komunikasi, 13(1)*,2014).
- Fishkin, J. S. . When the people speak. London: (Oxford University Press. 2009)
- Fukuyama, Francis.. The End of History and TheLast Man. (New York: Free Press. 1992)
- Habermas, J.. The theory of communicative action: Reason and rationalization of society. (Boston: Beacon Press. 1982)
- Husein, W. . Hukum, politik, & kepentingan. (Yogyakarta: LaksBang. 2008)
- Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar.. Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak. (Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2015)
- Kelsen, H. . Teori umum tentang hukum dan negara. (Bandung: Nusamedia. 2008)
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum,(*Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020*)
- Lomulus, Johny. "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung", dalam Demokrasi Mati Suri, (*Jurnal Penelitian Politik Vol. 4No. 1 Tahun 2007.*) 55-56
- Maruto, M. D. & Anwar. . Reformasi politik dan kekuatan masyarakat: Kendala dan peluang menuju demokrasi. (Jakarta: LP3ES. 2002)

- Mujani, Saiful dan Liddle, William. "Voters and the New Indonesian Democracy". Dalam Aspinall, Edward dan Mietzner, Marcus. *Problems of Democratisation in Indonesia*. (Singapore: ISEAS: 2010.) 75–99.
- Nonet, P., & Selznick, P. . *Hukum responsif*. (Bandung: Nusamedia. 2010)
- Rahardjo, S.. *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. (Yogyakarta: GentaPublishing. 2010)
- Rousseau, J. J..*Du contract social* (Edisi Terjemahan). (Jakarta: Visimedia. 2007)
- Soleh, A. Khudori, "Islam tidak Sama dengan Demokrasi", dalam (Jurnal El -Jadid, Pascasarjana UIN Malang, Vol. 3, No. 1, 2005)
- Strong, C. F.. *The modern political constitutions*. (London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limite. 1966)
- Subekti, V. S. . *Menyusun konstitusi transisi*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008)
- Unger, R. M.. *Teori hukum kritis*. (Bandung: Nusamedia. 2008)